

## **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN BENCANA DI KALURAHAN SRIMARTANI, PIYUNGAN, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Paskalia Elwod**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email: [paskaliaelwod110498@gmail.com](mailto:paskaliaelwod110498@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani dan untuk mengetahui 4 fungsi dasar manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk menemukan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani. Metode Penelitian yang digunakan: Deskriptif Kualitatif dengan Obyek Penelitian pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di kalurahan srimartani, kapanewon piyungan, kabupaten bantul, daerah istimewa yogyakarta. Subjek Penelitian pemerintah desa, FPRB, dan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana sudah di laksanakan namun belum berjalan secara maksimal dapat di lihat dari empat hal yaitu; 1) Perencanaan, proses dan mekanisme menyusun perencanaan sudah di laksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun (musrembangdus) yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan lebih tepatnya 35 hari. 2) Pengorganisasian sudah dilaksanakan dengan adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yang di bentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memberi informasi, perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana. 3) Pelaksanaan dapat dilihat dari tiga hal yaitu; pelaksanaan penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat dan lumbung sosial. 4) Pengawasan sudah di lakukan oleh pemerintah desa melalui keterlibatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan dan pada pelaksanaan penanggulangan bencana. 5) Kendala, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu; kondisi geografis yang rawan akan bencana alam, (gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang), terbatasnya anggaran dari kabupaten dan kendala lainnya.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Pembangunan, Bencana, Kalurahan.

**Abstract:** This study aims to describe the implementation of disaster-oriented development in Srimartani Village and to find out the 4 basic functions of management which include the planning, organizing, implementing, and monitoring processes. To find the obstacles faced in the implementation of disaster-oriented development in the Srimartani Village. The research method used: qualitative descriptive with research object on the implementation of disaster-oriented development in srimartani village, Kapanewon piyungan, Bantul district, special area of Yogyakarta. Research subjects are village government, FPRB, and the community. Data collection techniques, observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of disaster-oriented development has been carried out but has not run optimally, it can be seen from four things, namely; 1) Planning, processes and mechanisms for compiling planning have been carried out by capturing community aspirations through village deliberations (musrembangdus) which are held once a month. Exactly 35 days. 2) Organizing has been carried out with the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB), which was formed by the village government with the aim of providing information, protection and education to the community against disaster threats. 3) Implementation can be seen from three things, namely; implementation of disaster management, community participation and social granaries. 4) Supervision has been carried out by the village government through direct involvement in activities and in the implementation of disaster management. 5) Constraints, there are several obstacles in the implementation of disaster management, namely; geographical conditions that are prone to natural disasters, (volcanoes, earthquakes, landslides, fallen trees), limited budgets from districts and other obstacles.

**Keyword:** Implementation, Development, Disaster, Village.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang terpengaruh secara langsung atas ancaman dan resiko bencana. Gempa bumi cukup besar pada 27 Mei 2006 silam menimbulkan ribuan korban jiwa dan korban materi serta gocangan institusi sosial, menjadi petunjuk nyata bahwa kondisi daerah ini tidak lepas dari ancaman bencana. Potensi bencana gempa dapat saja terulang atau sangat mungkin terjadi bencana dalam bentuk lain. Mengingat wilayah Yogyakarta memiliki resiko bencana yang cukup besar. Beberapa ancaman bencana yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta anatar lain: Letusan gunung merapi, Tanah longsor, Banjir, Bencana kekeringan, Tsunami, Angin, Gempa bumi, Epidemid dan wabah penyakit. (Amini 2016: 102) di akses pada tanggal 19 April 2022)

Bencana di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 2008 hingga 2018 lebih banyak terjadi akibat faktor hidrologi atau cuaca. Berdasarkan grafik ada beberapa bencana yang terjadi di Bantul diantaranya bencana banjir terjadi sebanyak 8 kali, tanah longsor 32 kali, gelombang pasang 5 kali, puting beliung 32 kali, kekeringan 7 kali, dan gempa bumi sebanyak 2 kali (DIBI BNPB, 2018). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Bantul adalah bencana tanah longsor dan puting beliung. (<https://dibi.bnpb.go.id/xdibi> diakses pada tanggal 13 November 2021)

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sangat luas namun Kabupaten Bantul sangat rawan dengan terjadinya bencana alam. Dapat dilihat pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan status bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir tanah longsor, dan angin kencang. Penetapan ini mempertimbangkan prediksi datangnya fenomena La Nina, yang dimaksud La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan menjadi lebih tinggi. Status siaga darurat bencana di Kabupaten Bantul berlaku mulai tanggal 7 oktober 2020 hingga 28 februari 2021. (Dikutip dari Suara Jogja,<https://jogja.suara.com/read/2020/10/22/113126/jadi-wilayah-rawan-bencana-bantul-tetapkan-status-siaga-darurat> diakses tanggal 23 November 2021)

Program Desa Tangguh Bencana merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan saat bencana belum terjadi yaitu pada tahap pra bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai bencana (Kusumasari, 2014). Kegiatan kesiapsiagaan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang secara mandiri mampu merespon bencana secara cepat dan tepat berdasarkan pada pengetahuan dan pelatihan yang telah diberikan. (Amini 2016). Seperti Kalurahan Srimartani yang telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana pada tahun 2017. Hal ini diharapkan pemerintah desa mampu memberikan edukasi yang baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga masyarakat mampu dan siap menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Kalurahan Srimartani telah melaksanakan banyak program untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana alam. Antara lain dengan melaksanakan program sosialisasi, pendidikan bagi anak muda dan lain-lain. Diketahui program ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019. Namun di lapangan masih banyak warga yang belum siap dalam menghadapi bencana dan juga masih minimnya pembangunan secara fisik yang menjamin keselamatan masyarakat saat terjadi bencana, sehingga pemerintah desa mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan bencana dengan tujuan masyarakat mempunyai tempat untuk berlindung saat terjadinya bencana. Fokus penelitian adalah pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani dan untuk mengetahui 4 fungsi dasar manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk menemukan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Kalurahan Srimartani, karena beberapa pertimbangan penulis sebagai berikut: pertama, dari latar belakang masalah Kalurahan Srimartani adalah Kalurahan yang rawan dengan bencana seperti longsor, banjir, puting beliung dan kebakaran. Dan kedua bahwa lokasi tersebut terjangkau bagi penulis baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari efisiensi waktu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahann Srimartani. Subjek dalam penelitian ini antara lain adalah: Pemerintah Desa (Kepala Desa, Kepala Seksi Perencanaan. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) (Anggota). Kepala Dusun (Kepala Dusun Rejosari, Kepala Dusun Petir). Masyarakat Kalurahan Srimartani. Informan yang peneliti pilih adalah orang-orang yang lebih mengetahui informasi yang yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembangunan Berwawasan Bencana di Kalurahan Srimartani

#### Perencanaan

Perencanaan adalah suatu aksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa perencanaan suatu kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam menjalankan setiap kegiatan membutuhkan perencanaan mengenai langkah dan jalan yang akan diambil beserta gambaran dan hasil yang akan dicapai. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai ide atau gagasan menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan. Rencana pertama yaitu pembuatan peraturan desa tentang penanggulangan bencana. Rencana kedua yaitu, penambahan anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan bencana. Terdapat ada dua bencana yang menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah desa, bencana covid-19 dan bencana alam. selanjutnya untuk bencana alam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menyusun rencana kontijensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Isi dalam dokumen tersebut mempertimbangkan aspek sosial maupun aspek ekonomi. Misalnya aspek ekonomi, aspek ekonomi dalam bencana yang dimaksud adalah ketika bencana terjadi akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat karena kerusakan lahan sawah, kerusakan pada kebun masyarakat dan hilangnya sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian berkurang bahkan musnah terkena bencana tanah longsor.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada mekanisme dan proses dalam perencanaan, yang pertama ada musyawarah Dusun, yang diadakan setiap bulan sekali yang melibatkan semua tokoh, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan rt, perwakilan pemuda perwakilan kelompok tani. Hasil dari Musrenbang Dusun akan di kirim ke Kalurahan. Proses selanjutnya pemerintah desa mengadakan Musrenbang Kalurahan untuk menyepakati rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi (Renstra), proses selanjutnya adalah Musrenbang di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan ditingkat Dusun sangat rendah dilihat dari keterlibatan perempuan dalam muswarah Dusun yang dilaksanakan pada setiap 35 hari atau satu bulan. Keterlibatan perempuan hanya mengurus konsumsi dan bukan untuk memberi pendapat atau masukan oleh kelompok perempuan pada musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun dilaksanakan dengan membahas kegiatan masyarakat meliputi bersih-bersih Dusun, pemangkasan pohon besar di jalur utama Dusun, pembersihan sungai gawo, dan masih banyak kegiatan yang di laksanakan oleh bapak-bapak ditingkat Dusun.

Aspek perencanaan menurut George R. Tery dalam bukunya Sukama (2011: 82) merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika melihat perencanaan dalam pembangunan berwawasan bencana Kalurahan Srimartani maka dapat dikatakan bahwa tujuan perencanaan akan dicapai tergantung pada penggunaan asumsi-asumsi dan perkiraan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan jalan merumuskan dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang baik seperti terlihat pada dua hal yaitu;

Kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat Kalurahan Srimartani terdapat beberapa proses dan mekanisme, yang pertama kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun (MusrenbangDus), yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan lebih tepatnya 35 hari, kegiatan MusrenbangDus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kelompok yaitu: Dukuh, ketua rt, tokoh masyarakat, meliputi ketua muda mudi, dan perwakilan kelompok tani. Pada saat MusrenbangDus masyarakat akan menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi mereka seperti, pembangunan jalan, pembangunan TK, pembangunan instalasi air, pembangunan lahan, kegiatan kemasyarakatan dan masih banyak usulan program dari masyarakat. Terdapat juga beberapa program yang sudah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) seperti, peningkatan penanganan kesiapan penanggulangan kebencanaan yang bertujuan untuk; Pengembangan dan pelaksanaan ini untuk mengoptimalkan adanya korban bencana. Penguatan kelembagaan desa dan dusun dengan tanggap bencana. Sosialisasi dan simulasi, serta Pemenuhan sarana dan prasarana tanggap bencana. Hasil dari setiap usulan masyarakat dikirim ke tingkat kelurahan dan pemerintah desa akan mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), untuk menyepakati rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi (Renstra), kemudian pada tahap terakhir yaitu, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang tingkat Kecamatan), yang akan membahas dan menyepakati rencana kegiatan lintas desa di Kecamatan.

Perencanaan menurut George R. Tery dalam bukunya Sukama (2011: 82) menjelaskan bahwa dalam perencanaan membutuhkan suatu asumsi dan perkiraan untuk masa yang akan mendatang, artinya setiap perencanaan yang sudah disampaikan oleh masyarakat di Kalurahan Srimartani adalah berdasarkan asumsi dan juga perkiraan mereka terhadap keadaan lingkungan dan kebutuhan mereka. Penggunaan asumsi dan perkiraan dibutuhkan sehingga apa yang dirumuskan menjadi perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan yang baik dan tepat. Merumuskan dan menggambarkan suatu kegiatan diperlukan keterlibatan semua pihak sehingga mencapai



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tujuan yang diinginkan, namun di Kalurahan Srimartani pada saat merumuskan suatu kegiatan di tingkat Dusun cenderung hanya melibatkan kelompok laki-laki, tidak melibatkan kelompok perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa belum adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada saat proses dan pembangunan desa.

### **Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berinisiatif membentuk suatu lembaga yang di sebut dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan untuk melindungi masyarakat dari bahayanya bencana alam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FPRB antara lain; kegiatan sosialisasi kebencanaan di seluruh Dusun, pemilihan pengurus, pemangkasan pohon di jalur utama dan Dusun, setiap kegiatan rata-rata melibatkan lurah dan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah membentuk suatu lembaga yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang secara khusus untuk menanggulangi permasalahan bencana, dan mempersiapkan segala bentuk kegiatan kepada masyarakat sehingga mengurangi risiko dan dampak terhadap masyarakat. Pada saat terjadi bencana pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) akan bersama-sama terlibat dilokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat dan melakukan pendataan terhadap kerusakan. Hal ini berlaku untuk setiap bencana yang terjadi di Kalurahan Srimartani.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara disimpulkan Pembentukan Forum Pengurangan Bencana merupakan inisiatif dari pemerintah desa, tujuan dari pembentukan lembaga ini dengan tujuan memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana alam yang dapat merugikan atau pun merusak kehidupan masyarakat. Pembentukan FPRB merupakan point penting untuk membagi dan memberi tugas masing-masing dalam menggerakkan ataupun melaksanakan setiap kegiatan yang sudah disiapkan sejak awal. Tujuan lain dari pembentukan FPRB untuk memberi tugas dan tanggung jawab masing-masing individu agar saling mensupport dalam pencapaian organisasi. Tujuan lain dari pada pembentukan organisasi juga untuk melaksanakan rencana-rencana sejak awal hingga mencapai tujuan yang baik, hal ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh FPRB sebagai lembaga desa sehingga dapat menjalankan setiap kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang baik.

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry mengemukakan tentang organizing sebagai berikut. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang/pegawai, terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Jika melihat tujuan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengorganisasian akan berjalan jika ada pembagian tugas yang cocok dan sesuai dengan keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap anggota yang sudah di bentuk untuk melaksanakan setiap kegiatan seperti yang terlihat dalam dua point yaitu; 1) Pengelompokan 2) Pembagian wewenang

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pemerintah desa dan masyarakat. Berikut ada beberapa kegiatan pencegahan yang dilakukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kalurahan Srimartani pada setiap bulan, seperti bersih-bersih Dusun, sosialisasi, dan simulasi di tingkat Dusun, yang diadakan setiap tahun tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga mandiri dan siap siaga menghadapi ancaman bencana, namun tahun ini belum ada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan karena belum adanya anggaran. Tanggap darurat menurut Penanggulangan Bencana Daerah;

- 1) Menyelamatkan diri, menyelamatkan diri ketika terjadi bencana adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Hal yang sama telah di lakukan oleh masyarakat di Kalurahan Srimartani. Diketahui masyarakat di Kalurahan Srimartani pada saat terjadi longsor masyarakat akan mencari tempat yang aman.
- 2) Jangan panik, kepanikan memang menjadi hal yang susah untuk dihindari namun dianjurkan untuk tidak panik saat terjadi bencana. Tujuannya agar masyarakat bisa fokus untuk menyelamatkan diri, dan orang lain dan mengamankan harta benda yang dianggap penting. Masyarakat di Kalurahan Srimartani meskipun sudah sering mendapatkan penyuluhan, atau pendidikan bahkan simulasi namun pada saat terjadi bencana masyarakat tetap panik sehingga sampai saat ini Forum Pengurangan Risiko Bencana masih terus berusaha untuk memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Terdapat juga bagian yang perlu



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dilakukan pada saat tanggap darurat adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang mana di Kalurahan Srimartani kebutuhan dasar diberikan langsung oleh masyarakat.

Pencegahan atau mitigasi menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut;

- 1) Membuat petah atau denah wilayah, Kalurahan Srimartani saat ini berada pada tahap pencegahan dimana Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), telah membuat peta atau denah wilayah yang rawan bencana. Pembuatan denah atau petah ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya bencana alam, dan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh wilayah untuk melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana di wilayah.
- 2) Membuat alarm bencana, tahapan pencegahan merupakan tahapan yang sangat penting, tahapan ini diperlukan untuk memanalisis dampak bencana kepada masyarakat, seperti yang sudah di laksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pemerintah desa dan masyarakat. Pemasangan alarm bencana bukan hanya di rumah masyarakat tetapi juga di masjid yang posisinya berada pada zona merah, artinya tempat ini sangat mungkin terjadi bencana longsor.
- 3) Pembangunan tahan bencana, pembangunan tahan bencana dibutuhkan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dari bahayanya bencana. Bangunan tahan bencana yang dimaksud adalah bangunan yang siap merespon bencana, dan bersifat bertahan dari kerutuhan dan bersifat fleksibel. Misalnya pembangunan tahan gempa, yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban dan penempatan masa. Hal yang perlu diperhatikan ketika membangun bangunan tahan gempa yaitu memperkuat pondasi, beton, beton bertulang. Kalurahan Srimartani adalah daerah yang rawan dengan gempa melihat kejadian beberapa tahun, gempa jogja 2006 sehingga Kalurahan Srimartani membutuhkan bangunan yang tahan bencana, namun pembangunan tahan bencana sampai saat ini belum dilaksanakan sampai saat ini.
- 4) Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, pendidikan dan penyuluhan bencana diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebencanaan serta menghindari permasalahan bencana di kemudian hari. Penerapan pendidikan kebencanaan adalah upaya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pembelajaran siaga bencana. melalui pendidikan kebencanaan masyarakat mampu berpikir dan bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan penyuluhan merupakan hal yang penting bagi masyarakat di Kalurahan Srimartani, melihat Srimartani berada dalam zona merah sehingga Forum Pengurangan Risiko Bencana, bersama pemerintah desa melaksanakan kegiatan sosialisasi serta simulasi kepada masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dalam satu tahun sekali, namun ditahun 2022 diketahui belum ada kegiatan tersebut dikarenakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) belum mempunyai anggaran.

### **Bentuk Partisipasi**

Dalam partisipasi masyarakat, saya merujuk pada bentuk-bentuk Partisipasi masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012: 84).

- 1) Menjadi Anggota kelompok

Menjadi anggota kelompok, masyarakat di Kalurahan Srimartani terlibat aktif dalam beberapa kelompok seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan. Keterlibatan masyarakat pada kelompok-kelompok seperti yang sudah disebutkan diatas memiliki kegiatan yang berbeda-beda.

- 2) Melibatkan diri dalam Diskusi

Melibatkan diri pada kegiatan diskusi, seperti yang sudah peneliti jelaskan. bahwa ada beberapa kelompok di Kalurahan Srimartani, seperti kelompok bapak-bapak biasanya mengadakan pertemuan untuk membahas terkait kegiatan bersih-bersih Dusun, pemasangan lampu jalan lintas Dusun, pengaspalan jalan dan masih banyak kegiatan yang dibahas. Kelompok ibu-ibu atau perempuan adalah kelompok yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Kelompok perempuan hanya dilibatkan saat diminta untuk menyiapkan konsumsi. Sehingga, bagi peneliti peran perempuan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan diskusi di desa Srimartani sangat rendah. Artinya belum ada kesetaraan gender dalam proses penyampaian pendapat (dalam ruang diskusi).

- 3) Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan.

Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan Partisipasimasyarakat lain. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas bahwa masyarakat di Kalurahan Srimartani terlibat aktif dalam kelompok tingkat Dusun.

- 4) Sumbangan Materi

Partisipasi uang pada tahap pelaksanaan penanggulangan bencana, ada beberapa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Kalurahan Srimartani dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang. Masyarakat di Kalurahan Srimartani memiliki peran yang sangat tinggi, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana salah satunya dengan memberikan sumbangan secara materi kepada masyarakat yang terdampak



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

bencana. Diketahui untuk memberikan sumbangan kepada korban bencana Dukuh akan memberikan informasi melalui media sosial (*whatsapp*) kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan sumbangan secara sukarela.

#### 5) Partisipasi secara fisik atau tenaga

Partisipasi secara fisik (tenaga). Partisipasi secara fisik terlihat dari cara masyarakat melibatkan diri secara fisik seperti masyarakat di Kalurahan Srimartani yang terlibat dan membantu mengerjakan setiap kerusakan rumah maupun fasilitas-fasilitas umum yang terdampak bencana. Bentuk partisipasi yang terakhir yaitu memberikan dukungan berupa sumbangan sembako kepada korban bencana, pemberian sembako biasanya dikoordinir oleh dukuh maupun ibu dukuh melalui media sosial (*whatsapp*). Sumbangan yang diberikan berupa-rupa ada yang memberikan gula, teh, kopi, ada yang langsung memberikan makanan kepada korban bencana. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat menandakan bahwa semakin tinggi juga kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.

### **Lambung Sosial**

Lambung sosial, lambung sosial dikelola oleh pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Fungsi dari lambung sosial adalah untuk menampung segala bentuk sumbangan sembako dan peralatan dari desa maupun kabupaten yang diperuntukan kepada masyarakat korban bencana. Sumbangan sembako akan diserahkan oleh perangkat desa beserta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) berdasarkan data laporan dan jumlah korban bencana yang masuk ke data pemerintah desa. Namun pada pelaksanaannya tidak semua masyarakat korban bencana menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal ini menunjukkan belum ada pemerataan terkait pembagian sembako kepada masyarakat. Pada saat pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi tugas besar pemerintah desa dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat seperti masyarakat di Dusun Daraman yang sampai saat ini masih mendiami tempat tinggal mereka yang diketahui berada di titik rawan longsor.

### **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan setelah ada perencanaan, pembentukan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari pengawasan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan baik bersifat anggaran, prosedur maupun kewenangan. Suatu pengendalian dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para anggota.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) ketika menjalankan tugas dan kegiatan meliputi wajib melaporkan setiap kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada lurah atau sekretaris, wajib melaporkan setiap kegiatan pemangkasan pohon di jalur utama desa dan Dusun. Terdapat beberapa bentuk pengawasan yang pertama, setiap diskusi FPRB menghadirkan Lurah, kedua setiap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi harus mengetahui Lurah atau sekretaris desa. Kegiatan pemangkasan pohon di jalur utama Desa dan Dusun dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan masyarakat dan diketahui oleh lurah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, pengawasan dari pemerintah desa meliputi secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan baik kegiatan diskusi, sosialisasi dan simulasi hingga pelaksanaan penanggulangan bencana. Pengawasan yang kedua oleh masyarakat meliputi terlibat secara langsung dalam diskusi, maupun ikut berpartisipasi secara tenaga membantu memperbaiki kerusakan rumah akibat bencana, dan ikut memberikan sumbangan secara sukarela kepada korban bencana. Diketahui untuk pengawasan tidak ada lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah desa, karena Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) lembaga desa maka yang mengawasi adalah desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengawasan yang dilakukan meliputi, terlibat secara langsung dilapangan seperti, keterlibatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, menyiapkan dan memberikan sumbangan kepada korban bencana, mengikuti diskusi, memantau cuaca, menyebarkan informasi kepada masyarakat, menyiapkan titik kumpul yang aman bagi masyarakat dan menetapkan daerah-daerah yang masuk dalam zona merah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu; 1). Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Lurah sebagai penanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), 2) pengawasan yang dilakukan pada penanggulangan bencana di lapangan.

Berikut ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan



di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa di iringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kalurahan Srimartani perlu adanya pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat

Kontrol mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011: 110) mengemukakan bahwa. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan. Menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard/ukuran. Jika melihat aspek pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan untuk menentukan apa yang harus dicapai yaitu menentukan standar penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana.

Dalam proses dan mekanisme pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa pada pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Pengawasan tersebut dilakukan terutama kepada FPRB. Misalnya, dalam kegiatan pembagian sembako terhadap masyarakat atau perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana. Maka pemerintah desa harus memastikan bahwa FPRB bekerja sesuai prosedur, sembako yang dibagikan harus sesuai sasaran (masyarakat yang terdampak).

Terlihat pada gambar di atas bahwa ada diskusi (komunikasi) oleh pemerintah desa dan FPRB. Diskusi atau komunikasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan secara langsung oleh pemerintah desa, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di desa Srimartani. Di sisi lain, dalam proses tersebut juga, pemerintah desa menerima atau mendengar aspirasi, terutama kendala yang dihadapi FPRB., sehingga tujuan akhir dari pengawasan yakni menemukan kendala yang harus diperbaiki serta memastikan kelancaran kegiatan bisa terwujud. Menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sudah tepat, walau dalam pengawasan, tidak menentukan standar penilaian yang baku, untuk mengukur segala capaian kegiatan tersebut.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Dalam pelaksanaan kegiatan apapun, tentu selalu ada kekurangan atau kendala yang menghambat tercapainya sebuah tujuan. Sehingga, dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan data dan analisis terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di kalurahan Srimartani. Kendala sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kalurahan Srimartani dan FPRB seperti; 1). Kendala yang tidak dapat dihindari seperti kondisi geografis yang rawan akan bencana alam, (gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang, kebakaran), sehingga untuk meminimalisir dampak dari bencana alam perlu meningkatkan kualitas rumah yang layak huni serta memenuhi standar tahan gempa dan kesehatan. 2). Terbatasnya anggaran dari kabupaten. 3). Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia, dan masih rendahnya pemahaman pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana. 4). Kendala dalam bidang tanggap darurat, kurang tersedianya anggaran yang memadai, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5). Beberapa kendala dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, keterbatasan alokasi anggaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan terkait pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembangunan berwawasan bencana belum dilaksanakan secara optimal hal ini dapat dilihat dari komponen proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Proses dan mekanisme dalam penyusunan perencanaan sudah dilaksanakan dengan menjangkau aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musrembangdus) yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan lebih tepatnya 35 hari. Namun dalam proses perencanaan kurangnya keterlibatan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.

Pengorganisasi sudah dibentuk oleh pemerintah desa (seperti FPRB) dengan tujuan untuk memberi informasi, perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana terdapat kelemahan atau kekurangan, kurangnya pengetahuan atau sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana sudah dilaksanakan dapat dilihat dari tiga hal yaitu; Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh FPRB, pemerintah desa dan masyarakat. Meliputi, memberikan informasi tanggap darurat, mengamankan masyarakat saat terjadi bencana dan memastikan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan lainnya. Kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan belum tersedianya pembangunan yang tahan bencana di Kalurahan Srimartani. Pada saat pelaksanaan penanggulangan bencana masyarakat ikut terlibat secara tenaga (fisik), sumbangan dan buah



pikiran. Namun kelemahan dalam partisipasi masyarakat adalah masyarakat dijadikan sebuah objek pembangunan namun kurang diberi pemahaman terkait masalah yang sedang terjadi. Pada saat terjadi bencana masyarakat yang terdampak bencana akan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah desa yang bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak lainnya. Namun kelemahannya, terdapat kurangnya informasi sehingga belum adanya pemerataan dalam pembagian sembako.

Pengawasan/*Controlling* sudah di laksanakan oleh pemerintah desa, terutama pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Namun kelemahan dalam pengawasan, terletak pada belum adanya mekanisme atau standar yang baku, yang harus ditetapkan oleh pemerintah kalurahan Srimartani.

Pelaksanaan pembangunan berwawasan bencana di Kalurahan Srimartani, terdapat beberapa kendala, antara lain : kendala yang tidak dapat dihindari seperti kondisi geografis yang rawan akan bencana alam, (gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang, kebakaran). kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran dari kabupaten, adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia, dan masih rendahnya pemahaman pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana. Terdapat juga kendala dalam bidang tanggap darurat, kurang tersedianya anggaran yang memadai, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan beberapa kendala dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Perlu peningkatan partisipasi perempuan pada perencanaan pembangunan desa dengan dilibatkan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga adanya kesetaraan gender. Perlu meningkatkan pengetahuan tentang bencana dengan memberikan pelatihan kepada FPRB oleh pemerintah daerah maupun dinas yang terkait. Perlu peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dengan menambah jumlah sosialisasi maupun simulasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga masyarakat selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Perlu peningkatan atau penambahan anggaran dari kabupaten sehingga dapat membangun sarana prasarana yang layak huni di daerah rawan bencana. Perlu adanya peningkatan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat melalui pemangku wilayah setempat (Dukuh dan Ketua RT), kepada setiap lapisan masyarakat sehingga adanya pemerataan dalam pembagian sembako. Perlu adanya standarisasi pengawasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan penanggulangan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Perencanaan Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- Riyanto. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV.Mandar Maju. Bandung
- Widyoko. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP. Presa Group
- Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Afifudin. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Pustaka Setia
- Siagian, Sondong. S.P. 2014. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strateginya)*. P.B.Aksara.ed.Jakarta
- Kuncoro Mudrajat.2010.*Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika, Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Mardijono. 2008. *Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam*. Program Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum.2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prepektif Kebijakan Publik*. CV ALVABETA: Bandung
- Irma Purnamasari. 2018. *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Slamet. 2014. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. University Press: Surakarta
- Jurnal
- Amos Setiadi, Lucia Asdra R, Isak J. Langer, Luh Putu Widhiari. Penataan Permukiman Pasca Bencana Alam di Desa Pacarejo Kabupaten Bantul. Kajian tingkat partisipasi dan ketercapaian pembangunan. Volume 3, Maret 2020 p-ISSN 2655-4313 (Print), e-ISSN 2655-2329 (Online) <http://senada.std-bali.ac.id>



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Dewa Putu Suamba, Edi Nurdiantoro. *Pembangunan Berwawasan Budaya di Kota Denpasar*. Vol. 14 (1) Pp. 01-08 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/download/22712/14098>
- Didi Adhi. Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya.
- ISSN: 2088-7469 (Paper) ISSN: 2407-6864 (online) Volume 5 No 1, Tahun 2015  
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/60/57>
- Fenny Irfany Muhamad. Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Deyeuhkolot. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 11, Nomor 1, Januari 2020. E-ISSN:2565-2820. P-ISSN 1829-5762.
- Diansari Soliha Amini. Kampanye Gerakan Hijau Sebagai Mitigasi Bencana Dalam Kerangka Desa Tanggu Bencana Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Volume 06. Nomor. 2 Oktober 2016
- Murti Ayu Hapsari, Siswoto Siswoto, Nita Ariyani. Politik Hukum Hubungan Pusat Dan daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Volume 6, Nomor 1, Juni 2020 ISSN :2541-3139



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.